



Strategi Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikehidupan Masyarakat Pesisir Sungai Musi

Abdurrasyid Al Yamani¹⁾, M. Qur'anul Kariem²⁾, Isabella³⁾

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

Rasyida339@gmail.com¹⁾

mquranul@uigm.ac.id²⁾

Isabella@uigm.ac.id³⁾

Abstrak

Kajian ini berupaya membahas tentang Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana cara pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder, sumber dari data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kota Palembang. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan Strategi Pemerintah yang diterapkan meliputi beberapa aspek yaitu tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan, dan pembelajaran. Sehingga Strategi Pemerintah yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam penelitian menemukan bahwa Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan ini sudah berjalan dengan cukup baik namun sebagian program pengentasan kemiskinan ini masih bergantung pada program pemerintah pusat, pemerintah Kota Palembang sendiri belum memiliki banyak program dalam mengatasi kemiskinan ini. Dan yang menjadi evaluasi dari program pengentasan kemiskinan ini pada faktor komunikasi dan koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dan masyarakat, dan data administrasi masyarakat yang belum lengkap.

Kata kunci: Strategi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Masyarakat Pesisir Sungai

Abstract

This study seeks to discuss the Palembang City government's strategy in overcoming poverty in the Musi River coastal communities. The research problem is how the Palembang City government can overcome poverty in the coastal communities of the Musi River. The research uses a qualitative-descriptive approach, with primary data sources and secondary data, the sources of secondary data come from several authorized and related agencies such as the Central Statistics Agency and the Palembang City Social Service. Data collection through observation, interviews, documentation and literature review. Based on research conducted, it was found that the Government Strategy implemented includes several aspects, namely objectives, environment, direction, action and learning. So that the Government Strategy created can run well and effectively. The research found that the Palembang City government's strategy for overcoming poverty has been working quite well, but some of the poverty alleviation programs still depend on central government programs, the Palembang City government itself does not have many programs to overcome poverty. And the evaluation of this poverty alleviation program is based on communication and coordination factors between local government organizations and the community, and incomplete community administration data.

Key words: Government Strategy, Poverty Alleviation, River Coastal Communities



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keterbatasan akan kecukupan dan kualitas pangan, rendahnya akan kualitas kesehatan, rendahnya kualitas pendidikan, kecilnya kesempatan dalam lowongan pekerjaan, keterbatasan kualitas air yang bersih, lemahnya kejelasan akan kepemilikan dan penguasaan atas tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang buruk, kendala terhadap pertanggungjawaban rasa aman, kendala pada partisipasi masyarakat dan besarnya beban tanggung jawab keluarga. (Triani et al., 2020)

Kemiskinan memang masalah yang rumit, karena bukan hanya berhubungan dengan buruknya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berhubungan pula dengan buruknya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang sehat, pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang buruk (Suhandi et al., 2018).

Kemiskinan yakni salah satu persoalan yang menjadi opsi paling utama untuk diatasi oleh tiap periode pemerintahan di Indonesia. Beragam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang sudah berlalu maupun yang masih menjabat saat ini, mulai dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sekolah gratis, dan berobat gratis di berbagai provinsi di Indonesia, namun kebijakan-kebijakan itu masih tidak dapat sepenuhnya mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi hal ini kemudian menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas selain itu angka kelahiran yang tinggi apabila tidak diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat, kemudian akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan angka pengangguran pada masyarakat yang itu meningkat dikarenakan lapangan pekerjaan yang terbatas, pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan sebab kebanyakan seseorang yang pendidikannya rendah cenderung tidak mempunyai wawasan dan keterampilan yang kurang memadai untuk mendapatkan pekerjaan sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah ini susah untuk dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi baik di dunia kerja maupun di dunia usaha sehingga menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, dan distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya.

Trimo Yulianto mengatakan, Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama menyelamatkan keluarga dan kelompok masyarakat yang dilanda kemiskinan sementara, dan kedua menolong masyarakat yang dilanda kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan menangkai terjadinya kemiskinan yang baru. Strategi tersebut selanjutnya dimasukkan dalam tiga kebijakan yang langsung ditujukan untuk penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinannya. Strategi yang dilaksanakan yaitu dengan peminjaman modal dari lembaga informal, merantau atau berhemat, anggota keluarga ikut bekerja, dan menambah jam kerja.

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, secara geografis Kota Palembang dipisahkan oleh Sungai Musi menjadi dua bagian yakni seberang ulu di bagian selatan dan seberang ilir di bagian utara. Didapati jembatan ampera yang merupakan lambang Kota Palembang yang berada di tengah dua daerah ini. Hal ini memberi banyak manfaat bagi Kota Palembang, kemudian pemerintah kota berusaha memaksimalkan potensi dari menggunakan Sungai Musi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah kota tertua di Indonesia, Sungai Musi sendiri adalah salah satu sungai yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat nya terutama yang berada di pinggiran sungainya. Sungai ini memiliki panjang sekitar 720 kilometer dan melewati Kota Palembang. Dan memiliki aktivitas industri seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, aktivitas rumah tangga, maupun aktivitas alami yang masuk ke perairan sungai ini berdampak terhadap biota perairan dan kesehatan. Aktivitas tersebut juga menyebabkan terpaparnya logam berat seperti merkuri ke dalam badan sungai (Setiawan, 2013). Masyarakat sepanjang Sungai Musi memanfaatkan air sungai ini untuk mencukupi kebutuhan hidup, membasahi lahan perkebunan, usaha perikanan, dan alat transportasi (Wardhana, 2001).

Selain digunakan untuk sumber kehidupan, Sungai Musi juga bisa digunakan sebagai sarana transportasi yang mengembangkan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi sebagai kekuatan utama. Kebijakan menjadi faktor krusial untuk memastikan arah pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman, khususnya yang ada di pesisir sungai. Tidak hanya fokus pada fungsi ekologi sungai, tetapi aspek politik, ekonomi, dan budaya turut berdampak dalam merencanakan kebijakan karena secara tidak



langsung berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Salah satu daerah pesisir Sungai Musi yang menjadi fokus penelitian ini adalah daerah jalan pantai musu kelurahan 11 Ulu kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dan pada kelurahan ini memiliki jumlah 21 RT dan penelitian ini berfokus pada masyarakat yang berada di lingkungan RT. 05. Karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa masih ada program pemerintah yang tidak objektif yang tertuju kepada masyarakat yang membutuhkan dan cukup banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan dengan selayaknya, dan masyarakat di sini sangat membutuhkan sosialisasi agar dapat merubah pola pikir dan menambah wawasan mereka terkait pentingnya pendidikan terhadap anak, bahaya stunting, bagaimana memanfaatkan program dari pemerintah sehingga dapat menambah pendapatan mereka sehari-hari dan mengurangi angka kemiskinan.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan. Penelitian tentang Strategi Pengentasan atau Program Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia sudah cukup banyak dibuat oleh peneliti-peneliti lain. Penulis membandingkan judul penelitian dengan penelitian yang lain penelitian terdahulu yang menjadi dasar referensi pada penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu memfokuskan pada peran, efektivitas, ataupun pengaruh Pemerintah Daerah maupun Pusat terhadap program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri dan berfokus pada kemiskinan diruang lingkup Kota dan Provinsi. Dan di Kota Palembang jarang ada yang meneliti terkait kehidupan di Pesisir Sungai Musi dan disini penulis berfokus pada kebijakan pemerintah Kota Palembang terkait kehidupan pada masyarakat pesisir Sungai Musi dan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sungai di wilayah Jalan Pantai Musi Kelurahan 11 Ulu Kota Palembang. Maka dari itu penulis memutuskan untuk membuat penelitian mengenai Strategi Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kehidupan Masyarakat Pesisir Sungai Musi terutama di Jalan Pantai Musi Kecamatan 11 Ulu Kota Palembang.

Triani et al. 2020, dalam artikel nya yang berjudul Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang, memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini, yaitu Persamaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengentasan kemiskinan di Kota Palembang. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan jenis pengumpulan data nya berasal dari sumber beberapa instansi yang berwenang terkait program pengentasan kemiskinan dan berfokus pada pengentasan kemiskinan di ruang lingkup Kota Palembang. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Salah satu faktor dari kemiskinan yang ada di Kota Palembang adalah terbatasnya akses untuk mendapatkan modal, baik modal usaha maupun modal sosial dan politik. Mayoritas dari penduduk miskin Kota Palembang memiliki kesulitan dalam mendapatkan permodalan tersebut.

Dan kemudian Siagian et al. 2020, dalam artikel nya yang berjudul Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama ingin melihat sejauh mana kasus kemiskinan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan didaerah tersebut. Dan perbedaan dari adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh nelayan dalam mengatasi Kemiskinan di Daerah Kuala Lama. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah Metode survei dan penelitian ini berfokus pada masyarakat nelayan. Didalam penelitian ini menemukan hasil yang menunjukkan faktor penyebab kemiskinan nelayan di Desa Kuala Lama disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari rendahnya sumber daya manusia. Selain itu, ada faktor lain penyebab kemiskinan nelayan, yaitu fluktuasi musim ikan, alat tangkap sederhana, serta pendapatan dan pengeluaran nelayan yang tidak sesuai

Di Lokasi ini juga cukup banyak masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, hampir rata-rata masyarakat di RT 05 ini memiliki pendidikan pada Jenjang SMP dan SMA, sehingga cukup sulit dalam mencari pekerjaan yang layak dikarenakan pendidikan yang rendah ini, sehingga masyarakat yang bermukim di RT 05 ini hanya dapat mencari nafkah sebagai Ojok Online ataupun berdagang dan sebagian lagi ada yang jadi nelayan. Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 dijelaskan bahwa kawasan tepi Sungai Musi diarahkan untuk pengembangan pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pengembangan water front city (<https://peraturan.bpk.go.id/> 14 Desember 2012).

Tabel 1. Jumlah kemiskinan di kecamatan Seberang Ulu II

Keterangan	Jumlah
Keluarga sangat miskin	6,868
Keluarga miskin	480
Keluarga hampir miskin	420
Keluarga rentan miskin	383
Keluarga tidak miskin	807
Jumlah	8,958

Sumber: Pengolahan data DTKS Dinas Sosial Kota Palembang, 2023

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, termasuk observasi, dokumentasi, wawancara (Cresswel, 2019). Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, dalam hal ini, dari beberapa masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian dan beberapa pegawai dari organisasi pemerintah daerah (OPD). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku ilmiah, serta sumber data informasi dari internet (Cresswel, 2019).

Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung situasi atau kondisi di lingkungan pesisir Sungai Musi Kota Palembang, terutama pada masyarakat yang bermukim di RT.05, Jalan Pantai Musi Kelurahan 11 Ulu Kota Palembang. Wawancara digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat dan pemerintah Kota Palembang, memungkinkan peneliti untuk mendalami pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di daerah masyarakat pesisir Sungai Musi.

Data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan internet digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis program-program yang sudah disepakati yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan memadukan data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang program pengentasan kemiskinan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang mengikuti konsep yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, di mana data yang terkumpul dari berbagai sumber direduksi menjadi hal-hal yang paling relevan dan penting untuk penelitian. Proses selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah terkumpul dan direduksi akan dijelaskan dan disajikan dalam bentuk uraian yang memadai untuk dituangkan dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2022).

Setelah proses penyajian data, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Proses ini membantu peneliti dalam membuat kesimpulan berdasarkan temuan yang ditemukan selama penelitian. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti akan membandingkan temuan-temuan dari lapangan dengan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang didukung oleh data-data yang valid dan relevan (Sugiyono, 2022).

Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian adalah hasil akhir dari interpretasi dan analisis data. Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada temuan empiris yang diperoleh selama proses penelitian, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan bukti yang ada. Sebuah kesimpulan yang valid didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga memperkuat kredibilitas dari hasil penelitian (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Dalam penelitian kali ini peneliti menganalisis Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Surat Keputusan Walikota Nomor 462 Tahun 2022 Tentang Sumber dan Jenis Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem di Kota Palembang yang menjadi dasar untuk penerapan program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang. Adapun isi dari Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Surat Keputusan Walikota Nomor 462 Tahun 2022 Tentang Sumber dan Jenis Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem di Kota Palembang adalah bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Secara internasional, Kemiskinan Ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*) atau setara dengan Rp. 10.739,-/orang/hari atau Rp. 322.170,- /orang/bln. Dan berikut 3 (tiga) hal penyebab kemiskinan ekstrem, yaitu: 1) kondisi sosial-budaya; 2) keterbatasan sumber daya; 3) keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teori Strategi Pemerintahan dari Geoff Mulgan dalam Suwarsono (2012: 69-70), dimana menurut Geoff Mulgan Strategi Pemerintahan adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan pemerintah oleh badan-badan pemerintah secara teratur dan objektif untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat Geoff Mulgan tersebut mengandung arti bahwa strategi yang dimaksud adalah alat kekuasaan pemerintah yang berisi ide-ide dan gagasan-gagasan dalam mengatasi masalah dan kerumitan dalam pemerintahan.

Jika dihubungkan dengan teori Mulgan pada indikator pertama yaitu tujuan (*Purpose*) yang berarti pemerintahan itu bekerja untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang berfokus pada perubahan yang positif dan memiliki dampak yang dapat diukur. Maka isi dari kebijakan INPRES No. 4 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 462 Tahun 2022 yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan ini cukup berkaitan.

Masyarakat Pesisir Sungai Musi

Sungai merupakan salah satu wilayah perairan yang diam namun mengalir dari hulu sampai hilir. Sungai mengandung banyak manfaat untuk manusia dalam menjadi sumber air yang disediakan oleh alam. Manusia dari zaman sebelum masehi sudah memiliki cara dalam pemanfaatan Sungai. Keberadaan Sungai Musi sebagai tempat yang strategis inilah yang membuat Pemerintah Kota Palembang memfokuskan penataan ruang di kawasan pesisir Sungai dengan konsep *waterfront city*. Penataan ini bertujuan untuk menata kembali kawasan di pesisir Sungai dan menciptakan suatu tempat yang memiliki fungsi ganda yaitu, sebagai tempat perdagangan, pelabuhan, permukiman dan rekreasi.

Penetapan Kota Palembang sebagai Kota wisata air oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 semakin mendukung penataan ruang di Sungai Musi menjadi *waterfront city*. Oleh karena itu Pemerintah Kota Palembang menetapkan di dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012 – 2032 yang berisi tentang kawasan tepian Sungai Musi merupakan salah satu kawasan strategis kota yang diprioritaskan pembangunannya. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 – 2032 disebutkan bahwa kawasan tepian Sungai Musi diarahkan untuk pengembangan pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pengembangan *waterfront city*. Dalam mewujudkan Kota Palembang sebagai Kota Wisata Sungai maka dengan adanya hasil nomenklatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka satu – satunya lembaga di daerah yang paling berkompeten di dalam bidang kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang selaku lembaga Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Palembang.

Waterfront City merupakan Penataan ruang di pesisir Sungai Musi merupakan salah satu tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Palembang tahun 2012 – 2032, yang bertujuan untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai berbasis Pariwisata, Jasa dan Perdagangan berskala internasional yang berbudaya, aman, nyaman, produktif, hijau, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan tujuan dari *waterfront city* ini adalah perwujudan dari ruang wilayah kota yang ingin dicapai untuk masa yang akan datang dan agar terciptanya suatu keberlanjutan pembangunan. Fungsi dari tujuan ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang memberikan arahan bagi penyusunan suatu program sebagai dasar arahan penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Terdapat beberapa program yang sudah terlaksanakan, sudah proses pelaksanaan dan masih rencana. Program yang sudah terlaksana meliputi ketersediaan ruang publik, pasar tradisional, bedah rumah, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kepedulian mengenai lingkungan dengan melakukan sosialisasi serta ada pemantauan limbah industri yang mengalir Sungai Musi.



Gambar 1. Plaza 16 Ilir tepian Sungai Musi

Dilansir dari (www.detiksumsel.com) Kota Palembang memiliki tempat wisata baru yaitu Plaza 16 Ilir yang berposisi sangat strategis karena menghadap langsung ke Sungai Musi. Pembangunan plaza sekaligus dermaga di 16 Ilir ini menyajikan spot wisata yang iconic karena dekat dengan pasar yang cukup legendaris di Kota Palembang yaitu pasar 16 Ilir. Di Plaza 16 Ilir ini masyarakat bisa berbelanja sekaligus bersantai bersama keluarga karena disediakan fasilitas tempat duduk dan dilengkapi pedestrian yang rapi dan lantai keramik yang cukup indah, tidak cukup dari itu masyarakat juga dapat berfoto dengan latar belakang Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang menjadi *Icon* Kota Palembang tersebut dan juga masyarakat dapat menikmati aneka macam kuliner khas Palembang di warung terapung yang berada di pesisir Sungai Musi. Berdasarkan sumber yang sama Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Sumsel dan Babel Kemenhub Muhammad Fahmi mengatakan, Plaza 16 Ilir merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun setelah pembangunan selesai dan kawasan tersebut diresmikan, seluruh perawatan dan pengelolaan diserahkan dan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Palembang. Dan dilansir dari (www.liputan6.com) pembangunan Plaza Pasar 16 Ilir ini merupakan sebagai bagian dari proyek percepatan penataan kawasan sekitar Jembatan Ampera dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Tujuan (Purpose)

Penjelasan Mulgan di atas mengenai tujuan yaitu tentang menciptakan pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, dengan fokus pada perubahan positif, responsivitas, dan dampak yang dapat diukur. Tujuan tersebut menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penelitian kali ini peneliti menganalisis Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Surat Keputusan Walikota Nomor 462 Tahun 2022 Tentang Sumber dan Jenis Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Penargetan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Palembang yang menjadi dasar untuk penerapan program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang.

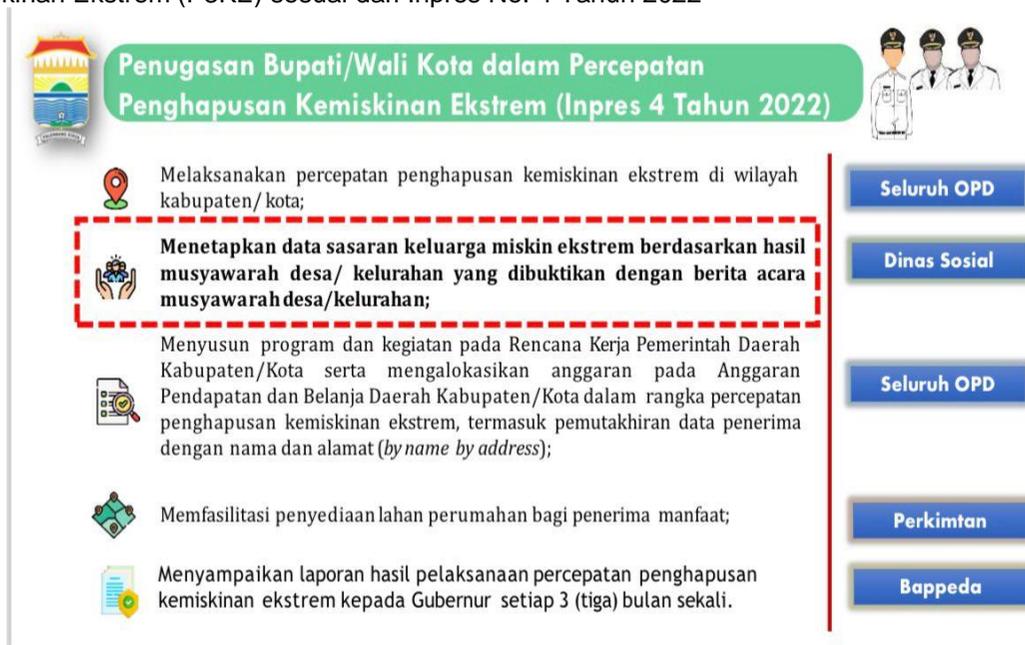
Pada indikator pertama ini yaitu tujuan (*Purpose*) Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki 3 (tiga) tujuan dari program pengentasan kemiskinan ini yaitu, untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Dengan beberapa program tersebut diharapkan angka kemiskinan dapat menurun. Dan kesimpulan pada indikator pertama ini sudah ditemukannya tujuan yang jelas dan berkelanjutan yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan secara makro namun untuk secara khusus untuk di masyarakat pesisir sungai itu belum dikategorikan.

Lingkungan (*Environment*)

Pada indikator selanjutnya yaitu lingkungan (*environment*), lingkungan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kolaborasi antara pemangku kebijakan (*stakeholder*) atau lingkungan sosial dan harus dilaksanakan dengan baik dan sejalan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan juga agar strategi atau program yang telah disusun ini dapat diimplementasikan dengan maksimal dan tepat sasaran sehingga masalah kemiskinan di Kota Palembang diharapkan teratasi secara bertahap tapi pasti. Pada indikator ini peneliti telah menemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah melakukan kolaborasi antar sesama OPD maupun swasta, dan juga masyarakat dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ditargetkan. Dalam suatu kondisi tertentu lingkungan sangat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena faktor-faktor tertentu, oleh sebab itu dalam melaksanakan suatu kebijakan perlu ada nya pertimbangan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

Adapun berikut penugasan terhadap Bupati/Walikota dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai dari Inpres No. 4 Tahun 2022



Gambar 2. Penugasan Bupati/Wali Kota dalam P3KE

Pengarahan (*Direction*)

Pada indikator ketiga ini yaitu pengarahan (*direction*) adalah sebuah pemikiran pemimpin yang inovatif dalam mengatasi kemiskinan dan respon yang baik dari Pemimpin (Walikota/Kepala Dinas) terhadap program pengentasan kemiskinan dan juga motivasi atau arahan kepada bawahan dari setiap OPD atau instansi lain dibawah naungan Pemerintah Kota Palembang untuk melaksanakan strategi atau program yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD atau instansi terkait, agar pelaksanaan program tersebut menjadi efektif dan maksimal terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang maupun para pemimpin baik itu Kepala Bidang di Dinas Sosial ataupun walikota telah memberikan arahan dan respon yang baik kepada bawahan agar pelaksanaan program tersebut dapat dijalankan sesuai dengan apa yang di intruksikan oleh para pemimpin dan mencapai tujuan dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang dan juga Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial Kota Palembang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dengan selayaknya.

Tindakan (*Action*)

Adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan juga bisa dikatakan keputusan yang diambil atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam beberapa konteks, Tindakan dapat merujuk pada langkah-langkah tertentu atau proses yang diambil untuk mencapai suatu hasil. Ini bisa terkait dengan rencana atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang dimaksud pada pembahasan kali ini adalah upaya atau aksi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dari rencana-rencana yang telah disusun di dalam program penanggulangan kemiskinan dan sebuah proses pelaksanaan atau pengimplementasian program-program pengentasan kemiskinan.

Berikut langkah pelaksanaan Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Palembang berdasarkan INPRES No. 4 Tahun 2022 :

1. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat
 - a. Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial (bansos dan jamsos);
 - b. Meningkatkan koordinasi kecamatan/kelurahan dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah;
 - c. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan);
 - d. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a. Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar;
 - b. Melalui peningkatan kapasitas SDM;
 - c. Melalui peningkatan kapasitas UMKM;
 - d. Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
3. Mengurangi Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan
 - a. Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar;
 - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
 - c. Mendorong konvergensi anggaran;
 - d. Mendorong konsolidasi program;
 - e. Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

Tindak Lanjut Pemerintah Kota Palembang terhadap INPRES No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ialah Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, Data sasaran keluarga miskin ekstrem (*by name by address*) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan rencana kerja sebagai target dan lokus intervensi program, Menyampaikan Laporan Pelaksanaan P3KE secara berjenjang & berkala.

Pada cara pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat adapun cara yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah dengan melalui program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan, sementara itu yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang walaupun bukan 100% program dari Pemerintah Kota Palembang namun Pemkot Palembang sangat berkontribusi terhadap jalannya program tersebut terutama pada wilayah Kota Palembang untuk bertujuan menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). OPD maupun instansi yang terlibat pada program ini adalah seluruh kecamatan dan kelurahan dan Dinas Sosial Kota Palembang.

Program pengentasan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan.

Kemudian dalam meningkatkan akses penduduk miskin ekstrem terhadap dokumen kependudukan (Akta kelahiran dan NIK) peneliti menemukan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang melakukan inovasi Si Jago dan Pacakela Terus dalam upaya dukungan terhadap registrasi NIK bayi yang baru lahir. Pacakela Terus merupakan salah satu

inovasi yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit, klinik, bidan bersalin untuk melakukan kerjasama dalam hal pemenuhan administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan akta kematian. Pacakela Terus merupakan singkatan dari paket cetak akta kerjasama layananan integrasi rumah sakit. Program ini sudah dilakukan dari tanggal 22 juni 2023 dan bekerja sama dengan 9 (sembilan) lembaga rumah sakit ataupun bidan.

Selanjutnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui 4 (empat) cara yaitu melalui peningkatan pendapatan/akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan akses pembiayaan UMKM. Peneliti hanya menemukan dilapangan hanya ada peningkatan terhadap akses pembiayaan UMKM, dimana diketahui pemerintah tidak melakukan adanya peningkatan kapasitas SDM dan UMKM melalui sosialisasi atau sebagainya didaerah Jalan Pantai Musi Kelurahan 11 Ulu Kota Palembang.

Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran merupakan sebuah proses dimana individu atau kelompok memperoleh sebuah pengetahuan, keterampilan sikap atau pemahaman yang baru melalui pengalaman atau studi. Pembelajaran bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, mengembangkan keterampilan baru dan mengubah sikap atau perilaku. Pada indikator ini juga pembelajaran yang dimaksud adalah sebuah proses evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam program pengentasan kemiskinan ini sehingga kedepannya dapat diperbaiki dan program pengentasan kemiskinan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

ditemukan pada dinas sosial Kota Palembang beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan program pengentasan kemiskinan ini adalah sebagai berikut:

- a) Keragaman sumber data dan masalah validitas data;
- b) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Pusat-Provisini-Kabupaten/Kota, termasuk kolaborasi antar pemangku kepentingan lainnya (dunia usaha/swasta);
- c) Kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan OPD yang menasar penduduk miskin ekstrem, termasuk keterpaduan antar OPD;
- d) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.

Dapat disimpulkan pada indikator Pembelajaran (*Learning*) ini yang dimaksud dari indikator ini adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan program pengentasan kemiskinan yang kemudian kedepannya dari faktor ini dilakukan proses evaluasi sehingga dapat menghasilkan suatu program yang lain atau cara yang lain agar program yang dilaksanakan lebih efektif. Peneliti menemukan pada indikator ini beberapa faktor yang menjadi hambatan sehingga jalannya program pengentasan kemiskinan ini menjadi kurang efektif, faktor-faktor tersebut adalah komunikasi dan koordinasi baik itu antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya, lalu masalah validasi data dan sumber data dari masyarakat yang tidak lengkap atau tidak mengupdate sehingga terjadi ketidaktepatnya sasaran bantuan dan anggaran Pemerintah yang terbatas. Dan ditemukan juga proses evaluasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang beserta jajaran setiap tiga bulan sekali. Dan penggunaan anggaran harus lebih efektif berfokus kepada program pengentasan kemiskinan jangan melenceng kepada hal lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Palembang dalam Mengatasi Kemiskinan di Kehidupan Pesisir Sungai Musi (Studi di jalan pantai mus kelurahan 11 Ulu Kota Palembang) penelitian ini berfokus pada masyarakat yang berdomisili di RT 05, RW 02 dikarenakan masyarakat di lokasi tersebut masih memiliki pendidikan yang cukup rendah, dengan menggunakan teori Strategi Pemerintahan oleh Geoff Mulgan yang memiliki 5 (lima) indikator yaitu, Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Pengarahan (*Direction*), Tindakan (*Action*), Pembelajaran (*Learning*). Dengan kesimpulan yang dapat diambil cukup banyak program atau kebijakan pemerintah yang sudah terlaksana seperti KIP, KIS, Kartu Pra-Kerja, bantuan sosial PKH dan BPNT dan seluruh bantuan atau program ini memang sudah dijalankan ditemukan di lokasi penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang jika mengacu dari data kemiskinan dan dari tiap indikator Strategi Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan bisa dikatakan efektif karena angka kemiskinan yang semakin menurun tiap tahunnya dan hampir seluruh variabel ditemukan pada penelitian ini, namun sebagian besar program masih bergantung pada program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Palembang belum banyak program untuk pengentasan kemiskinan dan instansi terkait pengentasan kemiskinan ini terutama Dinas Sosial ini belum berkontribusi banyak pada program-program



pengentasan kemiskinan ini, dikarenakan sebagian besar tugas yang dijalankan hanyalah penginput data. Dan untuk program pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai belum menjadi fokus Pemerintah Kota Palembang namun Pemerintah Kota Palembang telah memiliki rencana dalam pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Sungai dengan adanya inovasi *waterfront city* dengan pembangunan dermaga atau pelabuhan baru untuk angkutan barang, jasa, dan angkutan penumpang dan pembangunan plaza atau taman-taman di daerah pesisir Sungai Musi. Dan yang menjadi evaluasi yang harus diperhatikan adalah belum meratanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan dan masih ada masyarakat yang belum paham cara mendaftar sebagai penerima bantuan dan tidak selarasnya informasi yang disampaikan antara dari pihak instansi pemerintah ataupun kelurahan dan RT sehingga masyarakat cukup sering mendapatkan informasi yang salah.

Saran

Dalam alokasi anggaran Pemerintah Kota Palembang harus lebih efektif dalam menjalankan tugasnya terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Tidak harus melakukan penyusunan program di hotel-hotel mewah atau melakukan studi banding yang tidak bermanfaat. Sehingga dari tidak melakukan hal itu penganggaran dapat lebih efektif dilakukan kepada program pengentasan kemiskinan. Dan data kemiskinan yang digunakan pemerintah Kota Palembang harus valid sehingga bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan tidak melenceng.

Pihak Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial Kota Palembang ataupun pihak OPD lain yang melakukan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan ini harus melakukan sosialisasi lebih merata terkait tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan dengan seharusnya, pemberdayaan UMKM, tentang mengurus administrasi surat-suratan dan sosialisasi tentang pentingnya gizi dan pendidikan terhadap anak. Agar masyarakat mampu menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memperbaiki nilai ekonomi keluarganya dan mengurangi angka kemiskinan.

Pihak masyarakat terkhusus para remaja yang menerima bantuan yang diberikan dari program pemerintah pusat seperti dari program Kartu Pra-Kerja itu harus lebih bijaksana dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan jangan malah menggunakan bantuan tersebut untuk hal yang tidak bijaksana sehingga program tersebut tidak berjalan dengan efektif yang awalnya bertujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran masyarakat namun akibat digunakan tidak dengan selayaknya malah akan sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2021). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang. *Badan Pusat Statistik Kota Palembang*.
<https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/934/jumlahpendudukmiskindikotapalembangmaret2021mencapai19412ribuorang.html>.

Cresswell, J.W. (2019). *Research Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Intruksi Presiden Republik Indonesia. (2022). *Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.

Keputusan Walikota Palembang. (2022). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 462 Tahun 2022 Tentang Sumber dan Jenis Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Penargetan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Palembang*.

Melihat Wisata Baru di Palembang, Plaza 16 Ilir yang Habiskan Dana Rp. 7,5Miliar, Usung Konsep Tematik.
<https://www.detiksumsel.com/nasional/pr-9747560919/melihat-wisata-baru-di-palembang-plaza-16-ilir-yang-habiskan-dana-rp-75-miliar-usung-konsep-tematik>,

Nasikun. (2011). *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Bahan Kuliah*. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Putri, M. K., Septinar, H., & Daulay, R. W. (2019). Analisis pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap



kondisi masyarakat Hilir Sungai Musi. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 16(2), 80-89.

Plaza 16 Ilir, Destinasi Wisata Teranyar di Tepian Sungai Musi. Masuknya, Gratis. <https://www.liputan6.com/regional/read/5205496/plaza-16-ilirdestinasiwisata-teranyar-di-tepian-sungai-musi-masuknya-gratis?>

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032. Badan Pemeriksa keuangan Kota Palembang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31050perda-kota-palembang-no-15> tahun-2012.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Edisi ke 2), Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2).

Suwiyadi, S., Sumardi, S., & Nugraheni, M. A. (2020, June). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan: Sebuah Kontribusi Bagi Pengentasan Kemiskinan Perspektif Pada Wilayah Pesisir di Jawa Tengah. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 9, No. 1).

Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158.